

# Laporan Studi Lapangan: Pandangan Publik tentang Efektivitas Pelayanan Publik di Sektor Keamanan

Oleh Tim Redaksi

## A. Latar Belakang

Dalam era demokrasi sektor keamanan memiliki peran sangat spesifik untuk menopang demokratisasi dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Sektor keamanan tidak hanya berfungsi memberikan keamanan pada negara untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keberlangsungan negara-modern demokratis, tetapi juga dituntut memberi rasa aman pada warga negara, dalam bentuk keamanan publik, untuk menopang kemajuan dan keberlanjutan pembangunan.

Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara, yang pemenuhannya akan memberikan kontribusi pada kemajuan pembangunan. Kebutuhan rasa aman ini tidak hanya menjadi prioritas kebutuhan kelompok-kelompok kelas menengah dan atas, untuk atas proteksi hak-hak privat, atau swasta, dan industri-industri strategis, untuk menopang pertumbuhannya, tetapi juga kebutuhan prioritas kelompok kelas bawah, kalangan miskin, yang membutuhkan perlindungan dan proteksi atas aktivitas sosial-dan ekonomi mereka. Keterjaminan rasa aman dengan demikian akan memberi kontribusi pada perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan, bahkan bisa mengurangi kemiskinan yang menjadi kendala bagi kemajuan pembangunan.

Pengaruh terciptanya keamanan publik pada peningkatan ekonomi dan perkembangan kehidupan sosial-politik dan budaya yang sehat memang

kadang tidak terlihat secara langsung. Hal itu merupakan hasil dari efektivitas pelayanan di sektor keamanan yang memberikan kebebasan warga negara dalam bekerja, beraktivitas, berproduksi dan partisipasi dalam kehidupan publik. Keterjaminan kebebasan dan partisipasi ini, khususnya partisipasi dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang.

Sejak reformasi sektor keamanan bergulir tahun 1998, di Indonesia berlangsung perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik di sektor keamanan, dari yang berorientasi pada pengamanan kekuasaan dan politik pemerintahan otoritarian kini lebih tertuju pada berkembangnya demokrasi dengan segala pemenuhan hak-hak sosial-politik dan hak sipil dalam politik dan pembangunan. Institusi sektor keamanan, khususnya TNI dan Polri, sejak itu tidak lagi terlibat langsung dalam politik praktis dan lebih berorientasi pada keamanan warga negara dalam menjalankan demokrasi dan segala pemenuhan serta keterjaminan keamanan untuk menggunakan hak-hak sosial-politik, hak sipil dan hak-hak sosial-ekonomi mereka.

Pemisahan peran dan tanggungjawab TNI dan Polri, TNI lebih fokus pada masalah ketahanan sedangkan Polri pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, juga memberikan dampak efektivitas pelayanan publik di sektor keamanan

beserta transparansi dan akutabilitas dan kontrol publik atas pelayanan sektor keamanan yang ada. Selain itu, reformasi di ranah doktrin, kultur dan struktur kelembagaan atau institusi sektor keamanan juga memberi kontribusi tersendiri pada perbaikan pelayanan publik di sektor keamanan. Bahkan, ditopang oleh reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan untuk bekerjanya institusi sektor keamanan, yang sejak reformasi digulirkan, selalu tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang ada, memberikan dampak tersendiri pada kestabilan sosial-politik dan perkembangan sosial-ekonomi dan budaya.

Persoalannya sekarang adalah sejauhmana, setelah sepuluh tahun reformasi sektor keamanan bergulir, pelayanan publik di sektor keamanan mengalami peningkatan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan keamanan kepada publik dan warga negara ditengah tantangan dan masalah keamanan yang semakin meningkat dan beranekacam sebagai dampak dari globalisasi, demokratisasi, dan perubahan-perubahan sosial-ekonomi terkini pada kehidupan warga negara. Menjawab permasalahan ini, penting disini untuk melihat perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) dan performa kelembagaan di sektor keamanan, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara di bidang ketahanan nasional dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Penelitian ini mengkaji pandangan publik terhadap tata kelola, kelembagaan, dan performa institusi sektor keamanan dalam memberikan pelayanan di sektor keamanan warga negara dan keamanan manusia pada umumnya. Berbagai isu dan masalah ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dihadapi warga negara terkini, dan dirasakan publik, dalam berbagai bentuknya seperti ancaman dari luar, terorisme, konflik sosial, gangguan kriminalitas, tindak pidana, dan berbagai bentuk kekerasan kolektif di masyarakat lainnya, yang menjadi kepedulian warga negara dan publik pada umumnya disini pertama-tama coba diidentifikasi. Selanjutnya, bagaimana performa institusi keamanan, TNI dan Polri, selama ini dalam menjawab kebutuhan keamanan publik ini, melakukan pelayanan publik di sektor keamanan menurut pandangan publik, menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Dari bekerjanya kedua faktor tersebut diatas, kemudian bagaimana pandangan dan rekomendasi publik sebaiknya terhadap tata kelola yang baik sektor keamanan dan institusi keamanan, TNI dan Polri, seharusnya menjalankan perannya untuk perbaikan pelayanan publik di sektor keamanan menjadi fokus perhatian terakhir dari studi ini.

Studi Lapangan ini secara khusus dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan hasil studi sebagai berikut: (1) identifikasi isu-isu atau masalah-masalah keamanan terkini yang oleh publik dan warga negara dari berbagai kalangan dan latar belakang sosial-ekonomi dianggap penting dan mendesak untuk ditangani di berbagai daerah di Indonesia; (2) identifikasi pandangan publik terhadap kinerja dan performa institusi keamanan, TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan publik di sektor keamanan, perlindungan dan keterjaminan rasa aman publik dan warga negara; (3) identifikasi pandangan, usulan, rekomendasi publik terhadap tata kelola dan kebijakan publik di sektor keamanan terkait keberadaan berbagai institusi dan kelembagaan sektor keamanan, baik institusi keamanan negara maupun non-negara, atau keamanan privat, swasta dan perusahaan, dalam memberikan pelayanan publik di sektor keamanan; dan (4) identifikasi pandangan, usulan dan rekomendasi publik terhadap peningkatan kapasitas lembaga, agensi dan aktor dalam

institusi sektor keamanan, TNI dan Polri, untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan publik di sektor keamanan.

Studi Lapangan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indept-interview*) terhadap berbagai kalangan publik dan warga masyarakat dari latar belakang sosial-ekonomi berbeda-beda. Beberapa responden kunci diambil dari masing-masing daerah penelitian, dengan menekankan pada kriteria keterwakilannya dari institusi dan masyarakat, termasuk di dalamnya dari kesatuan Polri, TNI, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok strategis organisasi sosial-kemasyarakatan dan warga masyarakat pada umumnya.

Studi Lapangan dilakukan di daerah-daerah yang memiliki tingkat masalah keamanan tinggi sedang, dan rendah, dalam sebaran geografis di bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia, dan daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, Singapura, Philipine, Papua Nugini, dan Timor-Timur. Berdasarkan kriteria ini, penelitian dilakukan di tujuh (7) daerah di Indonesia, yaitu di: (1) Semarang; (2) Batam; (3) Samarinda; (4) Manado; (5) Jayapura; (6) Kupang, dan (7) Denpasar Bali.

Hasil wawancara mendalam kemudian dianalisis menggunakan analisis isi substansi dan konteks dimana responden berada dengan segala masalah keamanan dihadapi. Analisis hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptik dan analitik terhadap faktor-faktor penting menentukan dan mempengaruhi pelayanan publik di sektor keamanan.

## B. Batam: Aman Untuk Investor

Peran dan posisi Batam terhadap Singapura oleh pemerintah juga dianggap strategis sehingga daerah ini sejak awal dirancang sebagai kompetitor atau paling tidak sebagai alternatif bagi daya tarik pelaku perdagangan internasional. Meski hingga sekarang peran tersebut kurang tampak berhasil, tetapi Batam tetap mampu menunjukkan sebagai kawasan ekonomi yang bersifat komplementer bagi ramainya perekonomian jasa di kawasan Singapura. Batam tetap mendapat limpahan ekonomi dari peluberan aktivitas ekonomi Singapura yang semakin ramai. Tidak sedikit aktivitas ekonomi yang berpusat di Singapura membawa imbas terhadap Batam, seperti lalu-lintas barang dan jasa, penyimpanan barang, dan tumbuhan kawasan industri sebagai rangsangan dari perekonomian Singapura.

Menyadari akan peran strategis itu pemerintah Kota Batam mengupayakan terus terciptanya rasa aman bagi masyarakat dan para pelaku bisnis baik dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Batam terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan utama menumbuhkan kesadaran bahwa salah satu daya tarik utama Batam adalah terciptanya kondisi aman dan tertib. Dengan kata lain, pemerintah terus menekankan pada warga masyarakat Batam bahwa upaya penciptaan rasa aman dan tertib merupakan perilaku budaya atau menjadi bagian dari perilaku keseharian warga atas dasar kesadaran. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Humas Kota Batam, Jusfa Hendri, sebagai kawasan ekonomi yang strategis, warga Batam perlu menyadari bahwa investor sangat menuntut adanya jaminan keamanan. Oleh karena itu warga masyarakat Batam perlu secara sadar menciptakan rasa aman yang merupakan bagian dari perilaku budaya masyarakat.

Dalam interaksi sosial memang adakalanya terjadi gesekan yang menimbulkan konflik sosial dengan berbagai latar belakangnya, seperti tarik-menarik kepentingan ekonomi,

politik, maupun sosial-budaya. Untuk mengelola potensi konflik, pemerintah bersama warga masyarakat Kota Batam membentuk Forum Keluarga Nusantara. Pembentukan forum ini berangkat dari kesadaran bahwa warga masyarakat kota Batam bersifat multi etnis, yang terdiri dari Melayu, Batak, Jawa, Cina, Sunda, dan beberapa etnis lainnya. Tumbuhnya masyarakat multi etnis itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menempatkan Batam sebagai kawasan terbuka bagi aktivitas perekonomian. Berbagai perbedaan berlatar belakang etnis yang berpotensi konflik berusaha dijembatani oleh Forum Keluarga Nusantara agar terjadi komunikasi antarbudaya, sehingga konflik dapat dicegah secara dini. Forum ini dikelola oleh berbagai elemen masyarakat, yang datang dari kalangan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM yang berasal dari berbagai etnis. Aktivitasnya secara rutin melakukan pertemuan dan menggelar berbagai acara pentas budaya dari berbagai etnis yang ada di Batam.

Jajaran kepolisian juga membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) dalam upaya menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat Batam. Beberapa tokoh masyarakat oleh jajaran kepolisian diajak sebagai mitra untuk bersama-sama mengelola secara kreatif aktivitas penciptaan keamanan. Dengan melibatkan masyarakat, Polri bermaksud memberikan kesadaran bahwa penciptaan keamanan bukan saja tanggung jawab aparat keamanan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Model pengelolaan keamanan secara partisipatif ini mengedepankan pendekatan sosial-budaya dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subyek dari upaya penciptaan rasa aman dan kondisi tertib.

Dari segi tata ruang kota Batam juga mempertimbangkan aspek keamanan, yaitu membangun pemukiman dengan sistem blok. Pada setiap blok tersebut sekaligus memberikan

kewenangan bagi warga pemukim blok untuk membentuk keamanan secara swadaya. Kawasan pemukiman model blok ini memudahkan untuk mengendalikan keamanan melalui koordinasi dengan jajaran kepolisian. Dengan pemberian tanggung jawab terhadap komunitas warga pemukim blok, maka keamanan relatif mudah dikontrol karena siapa pun yang akan memasuki kawasan tersebut mengalami seleksi pencegahan tindak kejahatan oleh aparat keamanan di setiap blok. Siapa pun yang masuk dalam kawasan tersebut harus melalui satu pintu yang dijaga oleh aparat keamanan. Pemukiman warga seperti ini terbukti mampu menekan angka kasus kriminal di kawasan pemukiman warga.

Model pemukiman blok itu di satu sisi memang menyebabkan modal sosial (social capital) menjadi semakin hilang, tetapi model seperti itu memang merupakan konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat yang semakin individualistik. Sebagai kawasan ekonomi, secara sosiologis hubungan sosial menjadi semakin pragmatik, fungsional, dan bernilai ekonomi. Oleh karena itu, semakin berkembangnya pemukiman dengan sistem blok tersebut, ekonomi jasa yang bergerak dalam bidang keamanan menjadi semakin marak di Batam. Biro-biro jasa keamanan di Batam semakin banyak, dan cukup memberikan perluasan lapangan kerja.

Pemerintah kota Batam juga memanfaatkan *Information and Communication Technology* (ICT) dalam upaya membantu penciptaan rasa aman. Pemerintah Kota telah menjalin kerjasama dengan jajaran kepolisian dan dinas keemigrasian, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2007 tentang sistem keamanan melalui kamera CCTV pada obyek-obyek vital seperti di sekitar fasilitas umum, dan perempatan jalan. Juga diterapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) plus untuk registrasi kependudukan yang terhubung dengan jaringan kepolisian untuk mengontrol mobilitas penduduk, sehingga dapat mengantisipasi gangguan keamanan.

Di samping itu, Pemerintah Kota bersama Kantor Keemigrasian membuat jaringan berbasis IT dalam upaya memberikan layanan cepat untuk paspor dan visa. Layanan ini sekaligus juga dapat dipakai untuk mengantisipasi masuknya gangguan keamanan yang diseleksi melalui identitas paspor dan visa dari tindak kejahatan seperti Narkoba, perdagangan anak, dan tindak kriminal lainnya. Dalam upaya mendorong partisipasi warga dalam menciptakan keamanan berbasis IT, Pemerintah

Kota juga telah membangun 200 titik kawaan hotspot, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga untuk memberikan kecepatan informasi jika ada tindak kejahatan, bencana alam, dan umpan balik terhadap berbagai kebijakan di bidang keamanan.

Sementara itu, dalam bidang pertahanan posisi Batam yang secara geopolitik sangat strategis, hingga sekarang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai ilustrasi misalnya, hingga sekarang di Batam dan sekitarnya belum dibangun pangkalan angkatan laut. Padahal gangguan keamanan dan pertahanan sering terjadi di kawasan perairan Riau Kepulauan, dan bahkan kawasan udara. Tindak pencurian ikan oleh perahu-perahu asing, pencarian harta karun, perompakan, dan gangguan pesawat militer negara asing yang melintas kawasan Kepulauan Riau sering terjadi. Tiadanya dukungan teknologi dan peralatan memadai di bidang angkatan laut, menyebabkan gangguan keamanan dan masalah lemahnya pertahanan negara tersebut tidak teratasi. Menurut Jusfa Hendri, sudah saatnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana ke depan membangun pangkalan laut di kawasan Kepulauan Riau. Paling tidak memperbarui peralatan, armada, dan teknologi angkatan laut di kawasan perbatasan.

## C. Bali: Keamanan Untuk Industri Pariwisata

Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, kebutuhan akan rasa aman di wilayah Bali adalah sangat penting. Sedikit saja terjadi gangguan keamanan, maka akan berdampak pada menurunnya minat wisatawan berkunjung ke Bali. Oleh karena itu dapat dipahami jika pemerintah dan warga masyarakat Bali sangat sensitif terhadap berbagai peristiwa yang menimbulkan gangguan keamanan. Peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dan menyusul 2003 benar-benar memukul perasaan warga masyarakat

Bali, karena seketika itu sektor pariwisata menjadi terguncang. Kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis, dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Perekonomian Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata, karena itu jaminan rasa aman sangat diperlukan bagi para wisatawan mancanegara.

Meski dampak psikologis pasca bom Bali 2002 yang dilakukan oleh para teroris relatif sudah mulai sembuh, tetapi bukan berarti masalah keamanan Bali sudah tidak ada.

Kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas Bali dalam lima tahun terakhir tetap menunjukkan kenaikan. Meningkatnya kriminalitas ini merupakan problem serius yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali, karena berdampak besar terhadap dinamika perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata. Situasi ini membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika merasa prihatin. Apalagi, para wakil rakyat di Renon juga mulai mengkritisi hal itu dengan mengusulkan Bali KLB (kejadian luar biasa) kejahatan.

Padahal pemerintah Provinsi Bali itu telah mencanangkan program Bali Mandara (maju, aman, damai, dan sejahtera).

Salah satu contoh aktual tentang gejala meningkatnya tindak kriminalitas adalah bahwa pada bulan November 2009 dalam sehari tiga warga asing dijambret di sekitar wilayah Poltabes Denpasar. Juru Bicara Poltabes Denpasar, Komisaris Polisi Suwetra menjelaskan Tiga tindak kejahatan yang kembali menimpa warga asing di Pulau Dewata itu pertama dialami John Malcolmbucher (49) asal Australia, yang saat itu tengah melajukan kendaraannya di Jalan By Pass Ngurah Rai. Kedua adalah kasus yang menimpa wisatawan asal Belanda, Laila Mehdi (29). Perempuan yang bekerja sebagai fisioterapi ini tengah menikmati jalan-jalan di sepanjang Jalan Danau Tamblingan, Sanur, dan kemudian dijambret oleh penjahat yang naik sepeda motor. Ketiga tindak kejahatan yang dialami warga Jerman, Hannes Bublitz (22), yang tengah menikmati liburan di Bali. Pria yang tinggal di Perum Bumi Asri, Jimbaran No 12 Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini kehilangan sejumlah barang berharga seperti laptop merek Toshiba, dan uang tunai 700 Euro.

Sebagai daerah tujuan wisata utama, mata dunia selalu tercurah pada Bali, sehingga sedikit saja ada gangguan keamanan, maka akan berdampak meluas pada pencitraan Bali di mata internasional. Oleh karena itu jika terjadi sesuatu yang menyangkut rasa aman yang menimpa warga negara asing yang berlibur di Bali, maka mata dunia akan melihatnya. Sebagai ilustrasi misalnya, ketika ada wisatawan mancanegara kehilangan dompet yang berisi Rp 50.000, namun di dalamnya ada pula visa, maka otomatis akan melapor ke New York, sehingga dunia internasional akan tahu situasi Bali yang tidak aman itu. Apalagi jika terjadi perampokan terhadap warga Jepang hingga meninggal dunia, kemudian ada kasus perampokan orang Jepang, perampokan bank, dan kasus kriminal

lainnya, pasti mata dunia akan memantaunya, kata Gubernur Bali, Mangku Pastika.

Meskipun demikian, secara keseluruhan rasa aman di Bali masih cukup terasa kuat. Dari hasil pengamatan, warga Bali membiarkan parkir kendaraannya baik di rumah maupun di tempat-tempat umum tidak terlalu khawatir dicuri orang. Tampak terlihat di kampung-kampung kota Denpasar dan sekitarnya, orang memarkir kendaraannya di rumah dengan pintu garasi tidak terkunci, dan bahkan kunci kendaraan itu ada pula dibiarkan menggantung.

Secara kultural masyarakat Bali memang mempunyai nilai-nilai kuat tidak mencuri barang orang lain. Ajaran Hindu Bali dengan hukum karma masih diyakini secara kuat oleh warga masyarakat Bali. Mereka percaya bahwa siapa pun yang mengambil benda atau hak orang lain, meskipun tidak ketahuan pasti akan mendapatkan karma yang lebih sengsara. Karena itu, perilaku mencuri praktis jarang dilakukan oleh orang Bali sebagai implikasi atas keyakinan mereka akan ketakutan mendapat karma. Meskipun pengaruh modernisasi cukup kuat dalam menggeser peran nilai-nilai lokal, akan tetapi secara keseluruhan karma masih cukup efektif dalam mengendalikan perilaku orang Bali.

## D. Manado: Keamanan Berbasis Kerukunan

Dalam pandangan masyarakat Manado, situasi keamanan jika dibandingkan dengan era Orde Baru tidak terlalu jauh berbeda. Secara keseluruhan situasi di Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya keamanan relatif terjaga. Hanya saja potensi konflik yang berkaitan dengan aktivitas politik seperti Pilkada dan artikulasi tuntutan kepentingan sekarang jauh lebih marak. Jika di era Orde Baru orang tidak berani mengartikulasikan kepentingannya lewat demonstrasi, sekarang frekuensi

demonstrasi jauh lebih meningkat. Jika muncul ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah, warga masyarakat segera melakukan demonstrasi dengan turun ke jalan dan mendatangi kantor-kantor DPRD dan pemerintahan.

Nasrun Amanah, seorang dosen Antropologi dari FISIP Universitas Samratulangi memberikan informasi, dalam kasus Pilkada di Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi bentrok antarpengukung, karena pihak yang kalah tidak bisa menerima kekalahan

hanya. Eskalasi konflik politik memang terus meningkat, terutama jika menjelang dan pasca Pilkada. Namun demikian, situasinya akan segera mereda sesuai dengan berjalannya waktu, dan masing-masing pihak melakukan kompromi politik.

Sementara itu, menyangkut potensi konflik antaragama di Manado menurut Nasrun tidak terlalu potensial. Selalu ada upaya untuk meredakan jika terjadi peristiwa yang memicu konflik antaragama, terutama antara umat muslim dan umat nasrani. Kondisi itu juga diakui oleh Fikri Pakayan, aktivis LSM, bahwa masyarakat muslim dan kristiani saling menjaga dan menghargai, ada semacam ikatan persaudaraan, kedua belah pihak saling bersilaturahmi baik saat lebaran maupun natal. Ditingkat elit masyarakat di Sulawesi Utara cenderung menonjolkan atau mengutamakan kedamaian. Memang adakalanya terjadi gesekan sedikit, akan tetapi selalu ada upaya dialog sehingga gesekan kecil dapat diatasi dengan semangat kerukunan umat beragama.

Ketika berlangsung Pilkada, para tokoh agama sering diajak dialog dengan para politisi dengan tujuan mengantisipasi terjadinya gesekan antarpengukung yang menjerus SARA, sehingga konflik dapat dicegah secara preventif. Pertemuan antarelite bagaimanapun memang perlu diintensifkan karena masyarakat masih bersifat patrimonialistik, sehingga peran elite masih terasa dominan. Karena itu dengan dialog antarelite akan dapat mencegah terjadinya konflik yang mengganggu rasa aman dalam bermasyarakat. Sementara Nasrun mengharapkan hubungan antar umat beragama ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dan khususnya aparat keamanan agar tidak konflik dapat dicegah secara dini.

Pada prinsipnya kultur masyarakat Manado senang berdamai. Rocky Koagow misalnya, menjelaskan bahwa budaya orang Manado untuk berdamai sudah tertanam pada kesadaran mereka, dan tidak memandang latar belakang orang dalam menjalin persahabatan. Untuk hubungan antarumat beragama di Manado dibentuk Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA). Badan ini senantiasa menyelenggarakan forum dialog antarumat beragama, khususnya umat Nasrani dan umat Islam dalam upaya membangun perdamaian di Manado, dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Sedangkan untuk kasus-kasus kriminal, terutama di Minahasa, menurut Nasrun, kecenderungannya semakin meningkat dan meresahkan masyarakat, karena sering terjadi pemalakan, perampasan, dan perkelahian antarwarga. Truk-truk barang yang mengangkut hasil pertanian sering dipalak di tengah jalan. Sayangnya aparat keamanan tidak cukup proaktif dalam menangani meningkatnya kriminalitas tersebut. Kesigapan polisi kurang ditunjukkan, kinerja dan mentalitas polisi belum berubah, tidak profesional dan lamban, sering meminta imbalan jika warga masyarakat ingin berurusan dengan pihak kepolisian.

Akan tetapi secara keseluruhan kriminalitas di Manado relatif terkendali, karena peran aktif masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan. Menurut Anwar premanisme misalnya, sekarang sudah tidak begitu marak lagi karena masyarakat mulai berani melawannya. Jika warga masyarakat terus terlibat dalam mengatasi gangguan keamanan, sementara aparat kepolisian semakin proaktif dan profesional, maka kebutuhan akan rasa aman semakin terpenuhi. Tindak kejahatan akan dapat dijinakkan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor baik ekonomi, politik, sosial, dan hubungan antaragama. Untuk

itu, gangguan keamanan yang timbul dari masyarakat sendiri perlu segera ditangani. Oleh karena itu terhadap adanya Brigade Manguni dan juga milisi-milisi agama hampir semua informan setuju bahwa kelompok itu segera dibubarkan saja karena sangat mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat.

Sementara itu, tentang masalah pertahanan, di Manado masih sering terjadi gangguan pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal berbendera asing. Menurut Rocky Koagow seringkali kapal-kapal barang Philipina melintas perairan Indonesia, tetapi dibiarkan begitu saja karena armada Angkatan Laut Indonesia peralatannya masih minimal. Jika ada pencurian ikan juga dibiarkan saja, karena tidak adanya dukungan kapal-kapal Angkatan Laut yang canggih. Untuk itu, agar masalah pertahanan yang berupa gangguan dari luar, terutama yang terjadi di daerah perbatasan seperti Manado, Pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan agar anggaran dan peralatan untuk armada Angkatan Laut segera ditingkatkan.

## E. Jayapura: Miras Sumber Kriminalitas

Situasi keamanan di Jayapura sangat relatif, dalam arti bergantung pada faktor penyebab dan pemicunya. Beberapa faktor penyebab utama yang menimbulkan gangguan keamanan antara lain masalah kesenjangan ekonomi, Pilkada, dan masih kuatnya budaya minuman keras, terutama di kalangan warga masyarakat asli Papua. Meskipun situasinya terkendali, tetapi munculnya gangguan yang disebabkan dari beberapa faktor tersebut masih sering terjadi.

Dari aspek ekonomi, kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dengan warga pendatang masih sangat lebar. Perekonomian Jayapura dan Papua pada umumnya, lebih banyak dikuasai oleh warga pendatang, baik sektor perdagangan maupun industri. Warga asli Papua aktivitas ekonominya lebih banyak bergerak di sektor tradisional, menjual hasil bumi dan berbagai produk pertanian lainnya. Andrianus Kawer, seorang pegawai Rumah Sakit Daerah Jayapura mengakui bahwa ekonomi masih dikuasai oleh warga masyarakat pendatang. Keadaan ini berpotensi memicu terjadinya konflik antarwarga yang menjurus pada isu SARA. Masih rendahnya sumber daya manusia, terutama masih belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan penduduk asli Jayapura dan Papua pada umumnya, menjadi penyebab utama sulitnya mencari solusi masalah kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Kawer pemerintah perlu terus berusaha memberdayakan warga asli Papua melalui peningkatan pendidikan dan berbagai keterampilan untuk berwirausaha.

Potensi konflik yang berlatar belakang politik, kebanyakan dipicu oleh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Bentrok antarpendingung bakal calon bupati atau wali kota masih sering terjadi terutama menjelang dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Beredarnya isu politik uang, bantuan material dari para bakal calon yang ikut Pilkada terhadap warga masyarakat, sering kali meningkatkan ketegangan antarpendingung. Apalagi jika salah satu pendingung mengalami kekalahan, maka konflik antarpendingung menjadi eksplosif karena kurang bisa

menerima kekalahan. Intimidasi juga masih sering dialami penduduk pendatang, jika tidak mendukung salah satu kandidat penduduk asli. Konflik-konflik politik di seputar Pilkada dengan mudah memicu terjadinya eskalasi konflik yang bernuansa SARA.

Sementara itu, gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh masalah minuman keras masih sering terjadi. John Ohee, seorang tokoh masyarakat Jayapura, menuturkan bahwa masih maraknya minuman keras sering kali menjadi penyebab timbulnya tindak kriminal, seperti penembretan, pencurian, dan tawuran. Masalah ini juga diakui oleh aktivis LSM, Yan Sueni, bahwa tradisi minum-minuman keras menjadi faktor penyebab terjadinya perampokan dan pemerkosaan. Untuk mengatasi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh minuman keras ini cukup sulit karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Menurut Sueni PAD kota Jayapura sangat ditopang oleh maraknya perdagangan minuman keras, sehingga pemerintah belum berani bertindak tegas terhadap masalah ini, seperti mengeluarkan Perda yang mengatur pelarangan minuman keras.

Di samping itu, minuman keras di Papua lebih merupakan masalah budaya. Kebiasaan minum-minuman keras sudah mengakar pada tradisi masyarakat Papua, dan bahkan telah menjadi semacam identitas. Secara kultural tidak ada nilai yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk melarang minuman keras, dan bahkan karena kebiasaan minum-minuman keras itu sendiri telah menjadi perilaku budaya. Oleh karena itu, menghentikan kebiasaan ini sangat sulit, di samping berkaitan dengan aspek ekonomi juga berkaitan erat dengan aspek budaya.

Terhadap berbagai masalah keamanan di Jayapura tersebut, aparat kepolisian sebenarnya sudah cukup profesional dalam upaya menanggulangnya. Namun perubahan konstelasi politik nasional dari otoriter ke demokrasi, memungkinkan warga masyarakat lebih leluasa dalam menyampaikan

aspirasinya, sehingga berbagai gangguan keamanan yang disebabkan oleh kepentingan politik sering terjadi. Aparat kepolisian sering menghadapi situasi dilematis, karena jika ditangani secara represif akan menghadapi tuntutan pelanggaran HAM, tetapi jika tidak ditindak tegas, aktivitas demonstrasi massa sering kali menuju ke tindakan anarkis.

Oleh karena itu, hampir semua informan studi ini mengharapkan agar masalah gangguan keamanan, penanganannya perlu melibatkan masyarakat. Koordinasi dengan para tokoh agama, dan tokoh masyarakat, pendayagunaan RT/RW, dan partisipasi warga masyarakat

pada umumnya adalah penting dalam upaya menciptakan rasa aman. Bersamaan dengan itu pendekatan sosial budaya perlu ditonjolkan, sehingga penyelesaiannya lebih bersifat mendasar dan preventif. Dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat, maka berbagai persoalan gangguan keamanan akan dapat diselesaikan dengan lebih substansial, bukan bersifat tambal-sulam.

## F. Kupang: Rasa Aman Terusik Temperamental

Persoalan keamanan dan pertahanan di Kupang hampir mirip dengan yang terjadi di Jayapura. Dalam masalah gangguan keamanan kebiasaan minum-minuman keras menjadi penyebab utama dalam memicu munculnya tindak kriminal. Efek minuman keras itulah yang menjadi masalah keamanan yang sering terjadi di Kupang, seperti ngebut di jalan, pemalakan, dan perkelahian di tempat-tempat keramaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Kompol Okta G. Riwu, Kabid Humas, Polda NTT, penggunaan miras di kota Kupang ini cukup tinggi, karena miras ini merupakan bagian dari rangkaian acara adat. Umumnya yang terjadi dimasyarakat konsumsi miras berlebihan bisa menjadi pemicu konflik. Pada perinsipnya konsumsi miras ini baru berdampak indikasi pidana jika setelah dia mabuk mengganggu ketertiban umum, sedangkan kalau dia minum saja belum ada aturan hukuman buat mereka. Ada beberapa kasus yang mengganggu ketertiban umum, tetapi yang ditangani polisi itu bukan karena dia minum miras tetapi yang ditangani adalah tindakan yang diakibatkan setelah minum miras dan teridentifikasi pidana.

Dari aspek ekonomi, potensi konflik di NTT bisa datang dari masalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Upaya pemerintah daerah untuk menarik para investor mengeksplorasi sektor pertambangan, jika tidak menggunakan pendekatan populis akan berdampak serius terhadap meningkatnya konflik horizontal. Pembagian yang tidak adil, dapat menciptakan kesenjangan sosial yang mencolok sehingga ter-

jadi kecemburuan sosial dan memicu terjadinya konflik berkepanjangan. Pendekatan terhadap masyarakat melalui community development perlu dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan unsur perusahaan, pemerintah, dan komunitas setempat.

Dalam upaya menciptakan rasa aman di masyarakat Kupang, secara konseptual jajaran kepolisian mulai menerapkan apa yang disebut sebagai community policing, sebuah konsep keamanan yang berbasis komunitas. Menurut Riwu, bagaimanapun untuk menciptakan kondisi aman melibatkan peran masyarakat adalah sangat penting, sehingga kebutuhan akan rasa aman adalah tanggung jawab semua warga masyarakat. Tujuan utama community policing itu sendiri memang menumbuhkan partisipasi publik untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Karena itu polisi harus lebih proaktif bersama-sama masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani keamanan.

Di samping itu polisi terus berusaha melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam menangani gangguan keamanan. Tentang perlunya melibatkan tokoh masyarakat ini juga ditekankan oleh Eduard Gan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, bahwa dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, pemerintah telah melakukan dua cara. Pertama, pemerintah daerah selalu melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama atau pimpinan umat. Melalui kegiatan keagamaan atau temu masyarakat selalu diumumkan agar masyarakat bersama-sama membangun keamanan. Karena



kemanan dan ketertiban itu datangnya berawal dari diri sendiri, kemudian keluarga kecil, RT/RW, kelurahan dan akhirnya tercipta keamanan negara bahkan dunia. Kedua, melalui himbauan pemerintah mulai dari tingkat Walikota, Kecamatan, Kelurahan, hingga lingkungan RT/RW agar berpartisipasi aktif dalam menciptakan rasa aman.

Sayangnya menurut Riwu, ada kecenderungan para tokoh adat di NTT semakin kurang berpengaruh terhadap warga komunitas adat sendiri. Jika terjadi konflik tanah misalnya, peran tokoh adat tidak seefektif dulu lagi, karena kredibilitasnya di mata warga semakin menurun. Oleh karena itu, dalam penyelesaian konflik tanah, lebih sering diselesaikan melalui hukum formal, dan justru kemudian mengedepankan cara-cara kekerasan oleh pihak yang konflik sendiri dalam usaha menyelesaikannya.

Sementara itu menurut penilaian Yoakim Abi, Ketua Presidium Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia di Kupang, memang masih sering terjadi konflik horizontal yang bersifat primordial, atau fanatisme berlebihan dari etnis atau kelompok-kelompok tertentu. Sayangnya menurut Abi kinerja jajaran aparat kepolisian masih kurang bisa diharapkan. Memang polisi berusaha proaktif dan kooperatif dengan masyarakat sebagai implementasi community policing, tetapi menurut Abi semua itu masih dalam batas formalitas saja.

Dalam masalah pertahanan Yoakim Abi memberikan pandangan bahwa soal pertahanan keamanan ini juga sangat erat kaitannya

dengan NTT sebagai pintu gerbang hubungan teritorial antara Timor Leste dengan Indonesia. Dilihat dari aspek pertahanan nasional, masalah perbatasan dengan Timor Leste dapat berpotensi konflik di masa mendatang. Oleh karena itu peran TNI di wilayah provinsi NTT sangat strategis dalam upaya menciptakan perdamaian di perbatasan. Namun demikian, menurut Abi TNI harus mengubah paradigma dalam melaksanakan tanggung jawab mempertahankan wilayah di perbatasan. Jika dahulu lebih mengedepankan paradigma otoritarian, maka sekarang perlu lebih mengedepankan paradigma yang berorientasi perdamaian. Sikap arogan dan sering melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat perlu dihilangkan dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan manusiawi.

## G. Samarinda: Konflik Sumber Daya Alam

Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur menjadi barometer keamanan. Jika dibandingkan dengan era Orde Baru situasi keamanan di kota Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya berdasarkan pengakuan informan relatif tidak jauh berbeda, atau relatif terkendali. Hanya saja gangguan keamanan yang sering muncul lebih disebabkan karena faktor politik sebagai implikasi atas semakin terbukanya ruang dan peluang bagi warga masyarakat untuk berekspresi. Pada era reformasi, aktivitas unjuk rasa frekuensinya cukup tinggi, hampir setiap kali ada kebijakan pemerintah yang kurang populis segera mendapat reaksi masyarakat dengan berunjuk rasa.

Semakin terbukanya kebebasan berekspresi, terjadi penguatan identitas yang berlatar belakang kesukuan. Atas nama penduduk asli, menurut pengakuan para informan warga penduduk asli melakukan tekanan dalam berbagai kepentingan, seperti soal tanah, tuntutan prioritas tenaga kerja, dan pembagian hasil di sektor pertambangan. Wilayah Kalimantan Timur memang kaya dengan pertambangan, terutama energi migas dan batubara. Pengelolaan oleh pemerintah setem-

pat bekerja sama dengan investor yang kurang transparan menimbulkan reaksi keras dari warga masyarakat untuk menuntut pembagian hasil bumi yang adil. Aksi-aksi unjukrasa dalam masalah distribusi hasil sektor pertambangan ini menjadi indikator bahwa masalah ekonomi menjadi faktor menentukan terhadap penciptaan rasa aman di Kaltim.

Gangguan keamanan yang berupa kriminal, sebagaimana daerah lain, di Kaltim relatif cukup tinggi, kasus-kasus kriminal seperti perampokan, pencurian, penembakan, dan pembunuhan masih cukup sering terjadi, terutama di daerah urban. Kinerja aparat kepolisian menurut keterangan para informan cukup baik, tetapi kesan bahwa aparat kepolisian masih meminta imbalan untuk pelayanan yang lebih cepat masih terasa. Tidak sedikit oknum polisi yang meminta imbalan uang pada pihak korban, jika diminta segera mengurus masalah kriminalitas yang menimpa warga.

Salah satu alternatif yang paling baik dalam upaya menciptakan rasa aman di Samarinda menurut para informan adalah bagaimana kerjasama yang rapi antara aparat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat yang terepresentasi pada tokoh masyarakat merupakan agen potensial untuk menjaga situasi keamanan. Kredibilitas tokoh masyarakat, terutama tokoh adat, relatif masih tinggi di mata warga masyarakat, karena itu peran mereka sangat signifikan dalam upaya membangun keamanan yang terus kondusif. Berbagai konflik kepentingan yang timbul dalam masyarakat, sering kali melibatkan tokoh masyarakat, karena itu dalam upaya menciptakan perdamaian juga perlu melibatkan peran serta tokoh masyarakat.

Dalam masalah pertahanan, sebagaimana di daerah perbatasan, pelanggaran kapal-kapal asing di perairan dan tabal batas wilayah sering kali terjadi. Pencurian ikan, dan bahkan masalah pulau Ligitan Sipadan yang terletak berbatasan dengan Malaysia sering kali menimbulkan

ketegangan hubungan kedua negara. Kapal-kapal Malaysia yang sering memprovokasi masuk ke perairan Indonesia, menjadi indikator tingkat kerawanan kawasan perairan Kaltim dalam kaitannya dengan pertahanan nasional. Akan sangat baik jika pemerintah pusat memikirkan membangun pangkalan Angkatan Laut di Kaltim dalam upaya menangkal gangguan masalah pertahanan baik secara politik maupun ekonomi.

## H. Semarang: Keterbatasan Sumber Daya

Penelitian di Semarang, Jawa Tengah, dilakukan di Banyumanik, pinggiran kota Semarang. Daerah penelitian termasuk semi-urban sehingga ditemukan masalah keamanan cukup bervariasi, mulai dari tawuran antar warga di pelosok kampung, sampai masalah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di pinggiran dan bagian perkotaan. Tawuran antar warga merupakan kejadian umum terjadi di kampung-kampung pelosok kecamatan Banyumanik. Masalah sangat bervariasi, mulai dari kenakalan pemuda sampai masalah etika budaya berkaitan dengan perayaan pesta keluarga.

Polisi merespon kejadian berdasar laporan warga atau laporan khusus dari polisi bintang desa. Satu orang personel bintang desa di tempatkan di desa-desa, bertanggung jawab terhadap ketertiban desa. Polisi sektor Banyumanik sangat kenal dengan tawuran kampung di desa-desa kecamatan Banyumanik berdasar laporan yang ada selama ini. Pelayanan publik dilakukan dengan satuan unit reaksi cepat dalam patroli mobil dilakukan setiap hari. Memang dari segi sarana kepolisian masih membutuhkan tambahan sarana memadai. Namun, pelayanan dilakukan selama ini dirasa cukup memadai dengan sumberdaya personel sekitar 26 orang yang ada.

Khusus berkaitan dengan masalah pengendalian massa (dalmas) tugas dalam hal ini ditangani oleh kepolisian resort di atasnya, ditingkat kabupaten Semarang. Dalam soal ini peningkatan pelayanan masih diperlukan, terutama dalam hal metode dan

teknik pengendalian massa. Bukan hanya menggunakan sarana fisik, tetapi pengendalian psikologi massa dan sosiologi komunikasi, supaya penanganan bisa lebih efektif.

Masalah kriminalitas merupakan masalah kedua terpenting dihadapi kepolisian sektor Banyumanik. Kriminalitas terjadi terutama di daerah perkotaan. Berbagai kasus pencurian mobil dan kendaraan bermotor dilaporkan penduduk kepada polisi dan hasilnya dicatat dalam sebuah bank data. Dalam hal ini pendataan menjadi penting untuk mendeteksi kejadian. Seorang personel polisi mengatakan kejadian kriminalitas berulang-ulang terjadi menunjukkan pola kurang lebih sama. Mereka yang melakukan ya itu-itu juga, artinya sama orang atau kelompoknya. Dalam hal ini, pendataan sangat diperlukan. Bukan hanya untuk kepentingan menangani kriminalitas, tetapi juga masalah keamanan dan ketertiban lainnya. Bahkan untuk kepentingan mendeteksi konflik atau terorisme yang umumnya banyak terjadi di daerah perkotaan. Kapasitas kepolisian dalam hal ini perlu ditingkatnya, terutama menggunakan sarana teknologi moderen seperti komputer atau internet untuk mendeteksi dan mendata setiap laporan yang ada. Sistem informasi untuk peringatan dini diperlukan untuk antisipasi dampak kriminalitas terhadap konflik atau gangguan keamanan lainnya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah ketertiban lainnya yang dihadapi sektor kepolisian. Volume

kendaraan semakin meningkat di kota Semarang dan sekitarnya telah begitu padat. Perkembangan dari tahun ke tahun jumlah kendaraan dan penggunaan jalan semakin bertambah. Sementara kapasitas jalan sangat terbatas. Pengembangan sistem transportasi dan pengaturan lalu lintas disini menjadi sangat penting. Pengurangan kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh pelayanan publik di sektor keamanan. Memang pengaturan lalu lintas sangat penting. Tetapi pengembangan sistem transportasi dan lalu lintas dapat secara drastis mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Kepolisian dalam hal ini perlu mengembangkan pelayanan publik di bidang informasi lalu lintas memadai. Sistem informasi perlu

dikembangkan di sektor transportasi dan lalu lintas jalan raya. Selain peningkatan pelayanan publik dari personel polisi untuk mengatur lalu lintas jalan raya, kepolisian juga penting untuk ikut mengembangkan sistem informasi dan lalu lintas jalan raya, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas yang bertugas mengatur sistem transportasi dan lalu lintas jalan raya.

## I. Penutup

Serba-serbi situasi keamanan di berbagai daerah mengindikasikan bahwa masalah gangguan keamanan masih merupakan masalah penting dalam yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dari aspek politik, hampir di semua daerah menunjukkan gejala yang sama, yaitu perubahan konstelasi politik nasional dari era Orde Baru yang sentralistik dan otoriter ke era reformasi yang demokratis, membawa dampak cukup signifikan terhadap perubahan situasi keamanan di daerah. Kebebasan warga masyarakat dalam mengekspresikan aspirasi memberikan tekanan para semakin tingginya kasus-kasus unjuk rasa yang menimbulkan gangguan keamanan. Dinamika konflik masyarakat yang semakin ekspresif merupakan bagian dari proses demokrasi di daerah, menyebabkan situasi keamanan terus mencuat ke permukaan.

Akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan mulai tumbuh. Di Batam, Samarinda, Bali, dan Manado, masyarakat menyadari bahwa jaminan akan rasa aman merupakan faktor determinan untuk menggairahkan perekonomian. Dengan kata lain, masyarakat mulai menyadari bahwa tanpa jaminan keamanan, para investor dan wisatawan mancanegara tidak mau datang. Oleh karena itu, tanggung jawab masyarakat terhadap penciptaan rasa aman tampak semakin meningkat. Aktor-aktor keamanan dalam masyarakat yang berada di luar jajaran kepolisian dan TNI, di beberapa daerah memiliki peran cukup signifikan, sehingga melibatkan para

aktor tersebut dalam menciptakan rasa aman mutlak diperlukan.

Sementara itu masalah gangguan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya kriminalitas di beberapa daerah memang cukup fenomenal. Situasi ini memerlukan kinerja jajaran kepolisian untuk lebih profesional. Konsep *community policing* yang dicanangkan jajaran kepolisian sudah cukup tepat, tetapi masih memerlukan bukti nyata dilaksanakan dalam praksis di lapangan. Sebagaimana temuan studi ini, kesan bahwa politik di daerah masih belum melaksanakan konsep keamanan berbasis komunitas tersebut masih cukup terasa.

Sedangkan dalam kaitan dengan masalah pertahanan, sebagaimana temuan dalam studi lapangan ini, menunjukkan permasalahan yang sama. Kasus-kasus pertahanan seperti di Jayapura, Batam, Kaltim, Manado, dan Kupang menunjukkan bahwa konflik perbatasan yang dipicu oleh pelanggaran udara dan perairan laut oleh pihak asing masih terus terjadi. Hampir semua daerah mengharapkan agar pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan yang memperkuat sistem pertahanan di daerah perbatasan. Titik-titik strategis seperti wilayah perairan Batam, Manado, dan Kalimantan Timur perlu mendapat prioritas dalam pembangunan pangkalan angkatan laut. Bersamaan dengan itu pembaruan di bidang Alusista laut dan udara segera dilakukan untuk mengimbangi semakin canggihnya peralatan militer negara-negara tetangga.